

PARIWISATA
BERBASIS KOMUNITAS:
CONTOH KINERJA DI MASA PANDEMI
COVID-19

Publica Indonesia Utama

2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Achmad Suryana

PARIWISATA
BERBASIS KOMUNITAS:
CONTOH KINERJA DI MASA PANDEMI
COVID-19

Rais Agil Bahtiar
Masyithah Aulia Adhiem
Sony Hendra Permana

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pariwisata Berbasis Komunitas: Contoh Kinerja di Masa Pandemi Covid-19 / Dewi Wuryandani, Rafika Sari, Hilma Meilani, Iwan Hermawan | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xvi + 109 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-8232-02-4

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Pariwisata Berbasis Komunitas: Contoh Kinerja di Masa Pandemi Covid-19

Penulis : Rais Agil Bahtiar, Masyithah Aulia Adhiem, Sony Hendra Permana
Editor : Achmad Suryana
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya pada para Analis Legislatif Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Pariwisata Berbasis Komunitas: Contoh Kinerja di Masa Pandemi Covid-19”. Buku ini terbit sebagai hasil pengembangan lebih lanjut dari kegiatan pengumpulan data atas permintaan dan kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilakukan oleh para Analis Legislatif sekaligus untuk menyediakan suatu wacana yang menggambarkan kinerja sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap PDB, dalam menghadapi dan bertahan di situasi pandemi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah mengakibatkan guncangan terhadap perekonomian Indonesia, dan salah satu sektor yang paling banyak terdampak adalah sektor pariwisata. Buku ini cukup relevan untuk menggambarkan berbagai tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi oleh sektor pariwisata, terutama yang berbasis komunitas. Bagian pertama menggambarkan upaya pengembangan desa wisata sebagai salah satu contoh pariwisata berbasis komunitas, meliputi berbagai aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana peran pemerintah untuk membangun kolaborasi dalam mengelola pariwisata berbasis komunitas. Buku ini ditutup dengan membahas peran masyarakat dalam membangun ketahanan di lokasi desa wisata

sehingga wisata berbasis komunitas menjadi salah satu sektor yang berhasil bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan selamat kepada para Analis Legislatif yang telah berhasil menyelesaikan buku ini sebagai Karya Tulis Ilmiah yang bermanfaat dalam memberi gambaran komprehensif tentang kinerja sektor wisata berbasis komunitas selama pandemi Covid-19. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S. yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam menyempurnakan alur pikir dan alur saji dari buku ini, merancang tema, dan kegiatan editorial lainnya sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga berbagai masukan penting yang telah direkomendasikan oleh para Analis Legislatif dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan sektor pariwisata di Indoensia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Achmad Sani Al Husain

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Prolog	xi

Bagian I

Pemerintahan Kolaboratif dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas.....	1
--	---

Rais Agil Bahtiar

Pendahuluan	1
Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata ..	5
Konsep Pemerintahan Kolaboratif	13
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas.....	22
Kesimpulan.....	28
Daftar Pustaka	29

Bagian II

Pengembangan Desa Wisata di Era <i>New Normal</i>	33
---	----

Masyithah Aulia Adhiem

Pendahuluan	33
Perkembangan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 dan Era <i>New Normal</i>	34
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata .	34
Desa Wisata sebagai Model Pariwisata Berkelanjutan .	41

Pengembangan Desa Wisata di Era New Normal	50
Aspek Pengembangan Ekonomi.....	56
Aspek Pengembangan Lingkungan.....	60
Aspek Pengembangan Sosial Budaya.....	62
Penutup	64
Daftar Pustaka	65
Bagian III	
Kinerja Pariwisata dan Ketahanan Masyarakat di Desa Wisata pada Masa Pandemi Covid-19	71
<i>Sony Hendra Permana</i>	
Pendahuluan	71
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia	74
Desa Wisata: Pengertian dan Perkembangannya.....	78
Upaya Mengatasi Dampak Pandemi dan Ketahanan Masyarakat di Desa Wisata.....	82
Dukungan Pemerintah dan Strategi Pengembangan Desa Wisata.....	91
Penutup.....	94
Daftar Pustaka	96
Epilog.....	101
Indeks	104
Biografi Editor	106
Biografi Penulis.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proses Transformasi Kolaborasi	6
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia berdasarkan Pintu Masuk.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model pemerintahan kolaboratif.....	19
Gambar 1. Jumlah Desa Wisata per Kategori Tahun 2022.....	54

PROLOG

Pariwisata Berbasis Komunitas atau Community Based Tourism dalam kondisi perekonomian normal dapat dipandang sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki masyarakat setempat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian wilayah, melestarikan sumber daya serta budaya, dan menciptakan sumber pendapatan masyarakat. Dalam implementasinya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas di dalam suatu wilayah kerja terkecil, yaitu di tingkat desa, disebut dengan desa wisata. Pengembangan desa wisata seyogyanya mempunyai atau sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat desa, dengan unsur-unsur penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, pelibatan anggota masyarakat sebagai bagian dari pelaku usaha wisata, pengembangan ekonomi yang menunjang aktivitas wisata, dan pelestarian sumber daya alam dan budaya desa. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan: 1) Penyiapan obyek wisata tanpa mengubah postur aslinya, 2) Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas wisata yang sesuai keunikan obyek wisata, 3) Penyiapan masyarakat menghadapi proses perubahan pola pikir (mindset) dan sikap terhadap wisatawan sebagai tamu yang diharapkan memberikan dampak positif bagi desa dan masyarakat, dan 4) penyiapan kelembagaan (organisasi dan aturan main yang disepakati bersama) pengelolaan desa wisata berlandaskan prinsip organisasi modern, kemitraan, dan adil dalam distribusi manfaat.

Bukubungarampaidenganjudul“PARIWISATABERBASIS KOMUNITAS: Contoh Kinerja di Masa Pandemi Covid-19”

membahas pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat, dengan menampilkan penerapan konsep pembangunan di bidang pariwisata dan contoh kasus wisata desa hasil dari pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Buku ini cukup ringkas dengan menyajikan tiga bagian. Artikel pertama menguraikan tentang pendekatan pemerintahan kolaboratif dan Model Pentahelix dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, ditulis oleh *Rais Agil Bahtiar*. Naskah kedua membahas pengembangan desa wisata di era *new normal*, disiapkan oleh *Masyithah Aulia Adhiem*. Bagian ketiga menyajikan topik tentang ketahanan masyarakat di desa wisata dalam masa pandemi covid-19 dari *Sony Hendra Permana*.

Rais Agil Bahtiar memulai pembahasan dengan mengemukakan pengertian Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance*) yang disitasi dari berbagai pemikiran para ahli. Pemerintahan kolaboratif merupakan upaya pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan publik, baik sebagai perseorangan ataupun kelompok terorganisir, seperti pihak swasta, akademi, ataupun organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi menyiratkan adanya komunikasi dua arah dan pengaruh timbal-baik antara lembaga dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Para pihak bertemu bersama dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengimplementasiannya.

Pengertian praktis dari pemerintahan kolaboratif adalah sebuah proses dari para pihak yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu masalah tertentu serta berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri. Komponen pemangku kepentingan yang melaksanakan kebijakan tersebut, dalam hal ini kepariwisataan, adalah pemerintah, pihak swasta/pebisnis, akademi, kelompok

masyarakat atau komunitas, dan media massa atau lebih dikenal dengan Model Pentahelix. Bahtiar mengemukakan argumentasi bahwa desa wisata bisa maju dan berkelanjutan apabila pengembangannya dilakukan dengan pendekatan pemerintahan kolaboratif.

Bagian kedua membahas pengembangan desa wisata di era *new normal*, yang ditulis *Masyithah Aulia Adhiem*. Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, sehingga wisatawan dapat merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Pemerintah mengharapkan pengembangan desa wisata dapat mengurangi urbanisasi dan sekaligus melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Desa Wisata ternyata dapat berperan menjadi salah satu bantalan dalam menghadapi guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Seperti halnya yang diterapkan di berbagai negara, luasnya sebaran dan tingginya kecepatan penularan Covid-19 menyebabkan pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengeremnya, melalui penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak kebijakan ini menghantam keras aktivitas beberapa sektor perekonomian, salah satunya sektor pariwisata. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami penurunan sebanyak 75 persen dari tahun sebelumnya, dari 16 juta wisman di tahun 2019 menjadi hanya 4,08 juta wisman. Pada tahun 2020. Tidak sedikit hotel dan penginapan yang harus menghentikan usahanya dan kehilangan kemampuan untuk meneruskan kegiatan operasional. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,05%, turun dari tahun 2019 sebesar 4,7%.

Seiring dengan mulai diberlakukannya kebijakan *new normal* (keadaan kehidupan normal dengan keseimbangan baru) sebagai upaya pemerintah untuk dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 yang belum kunjung berakhir, kegiatan masyarakat mulai dapat dilakukan kembali secara bertahap dengan berbagai penyesuaian. Kegiatan wisata mulai dibuka perlahan, awalnya dilakukan di ruang terbuka tanpa bergerombol banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, destinasi desa wisata yang mengedepankan pemanfaatan ruang terbuka menjadi alternatif yang tepat. Banyak desa wisata yang mulai bangkit, melakukan penyesuaian aktivitas sejalan dengan protokol kesehatan, sehingga perlahan dapat melanjutkan usahanya.

Artikel *Masyithah Adhiem* menjelaskan pemanfaatan peluang pengembangan desa wisata di masa pandemi Covid-19. Pendekatan penanganan pandemi dengan konsep era *new normal* hidup berdampingan dengan Covid-19 disajikan dalam tulisan ini. Artikel ditutup dengan pernyataan secara komprehensif pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan parsial secara sepihak, namun harus melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan baik masyarakat setempat, pemerintah, maupun swasta serta industri pendukung, sesuai dengan Model Pentahelix dengan pendekatan pemerintahan kolaboratif.

Pada saat pandemi Covid-19 memuncak dan kebijakan PSBB diterapkan dengan ketat, hasil survei dari Desa Wisata Institute menunjukkan bahwa seluruh desa wisata yang menjadi responden telah menutup kegiatan usaha wisatanya. Namun terdapat satu kekuatan Desa Wisata, yaitu tidak hilangnya pekerjaan utama masyarakat sebagai upaya bertahan di tengah hantaman dampak Covid-19. Laporan survei menyebutkan 9,6% masyarakat di Desa Wisata masih memiliki pekerjaan pokok di luar pariwisata, sebagai petani, pekerja swasta, pengrajin, dan pekerjaan informal lainnya. Dengan demikian, Desa

Wisata memiliki karakter kemandirian ekonomi yang didukung oleh sumber daya setempat, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Aktivitas ekonomi di Desa Wisata merupakan tambahan kegiatan dari masyarakat setempat dalam upaya mengoptimalkan sumber daya dan budaya yang dimilikinya.

Artikel di bagian ketiga yang ditulis *Sony Hendra Permana* mengulas ketahanan masyarakat desa wisata seperti disebutkan di atas, dengan mengambil contoh kasus desa wisata yang berada di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Pada aspek ketahanan masyarakat, sesungguhnya masyarakat di desa wisata lebih resiliendibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini terlihat dari ketahanan pangan masyarakat di desa wisata berbasis pertanian. yang secara umum mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dihasilkan sendiri. Kesempatan kerja pun relatif tidak terganggu, karena pekerjaan dilakukan di lapangan terbuka, menyesuaikan dengan karakter alam dan lingkungan, dan tidak harus selalu berdesakan dalam suatu ruangan tertutup. Di desa wisata berbasis nonpertanian, ketahanan pangan dan ketahanan pekerjaan sedikit terganggu, karena ada penurunan aktivitas ekonomi. Pada aspek ketahanan kesehatan, masyarakat perdesaan pada umumnya lebih tahan terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan, walaupun wilayah desa juga terbuka bagi mobilitas orang, tetapi mobilitas masyarakat di dalam desa, antar desa, dan antar wilayah yang lebih luas relatif lebih terbatas, dengan jumlah kerumunan yang juga relatif kecil,

Dengan demikian, sesungguhnya masyarakat desa wisata memiliki kemandirian yang berlandaskan potensi sumber daya lokal, jauh sebelum adanya pandemi. Kegiatan pariwisata di desa merupakan suatu inovasi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perekonomian desa berbasis kekayaan sumber daya atau agro-ekosistem

setempat. Menyadari potensi tersebut, desa wisata seyogyanya dikembangkan dengan terstruktur sehingga dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat desa, baik di masa normal, terlebih dapat menjadi bantalan di masa munculnya guncangan.

Pengembangan desa wisata memerlukan dukungan berbagai pihak, khususnya pemerintah untuk mendorong penciptaan dan penerapan inovasi masyarakat desa wisata, sehingga kegiatan kepariwisataan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, diperlukan strategi yang tepat agar pengembangan desa wisata dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan kerangka regulasi, kelembagaan, peningkatan akses pada sumber pembiayaan dalam konteks penerapan pemerintahan kolaboratif; dan pengembangan kemitraan yang sejajar antara para pelaku pariwisata dalam konteks Model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media massa.

Editor,

Achmad Suryana

EPILOG

Tiga artikel yang disajikan dalam buku ini, dan diharapkan para pembaca sudah mencermatinya, menyajikan gambaran peran pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, hantaman keras dari pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi, dan upaya bangkit kembali pada saat sudah dikeluarkan kebijakan kelonggaran bergerak kepada masyarakat. Buku ini juga menyajikan adanya suatu segmen kegiatan pariwisata yang mampu lebih cepat untuk bangun kembali dari guncangan besar yang menimpa skala nasional dan global yaitu “wisata desa”.

Beberapa butir dapat ditarik sebagai saripati dari ketiga tulisan dalam buku ini. Pertama, pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi penting sebagai penyumbang PDB nasional maupun regional, penyedia kesempatan kerja, dan sumber pendapatan masyarakat desa. Sektor ini dapat tumbuh cukup pesat didorong oleh berbagai program pemerintah yang bertujuan memajukan pariwisata nasional, yang disambut antusias oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Kedua, pandemi Covid-19 menghantam sangat keras pada perekonomian berbagai negara dan secara global, dan sektor pariwisata (transportasi, hotel dan jasa, rekreasi) mengalami kontraksi yang hebat di tahun pandemi. Hal ini terjadi selain oleh pandemi dengan virus yang mematikan dan mampu menular ke berbagai wilayah dengan cepat, juga sebagai dampak kebijakan hampir di semua yang membatasi pergerakan orang dan barang, sebagai upaya membatasi

penyebaran virus tersebut. Saat itu muncul istilah “*lock down*” untuk negara tertentu yang wilayahnya kecil atau untuk wilayah tertentu dalam suatu negara, sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran atau mencegah penularan. Kejadian buruk yang menimpa ekonomi dan terlebih sekor pariwisata, dialami oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Ketiga, di dalam sektor pariwisata ada segmen usaha yang para pelakunya mampu bertahan dari guncangan yang datang dari luar walaupun aktivitas wisatanya terganggu atau terhenti. Segmen tersebut adalah wisata berbasis komunitas yang dikembangkan dalam batas wilayah desa, yang disebut desa wisata. Segmen usaha ini terhenti saat pandemi mengalami puncaknya, namun ketahanan ekonomi masyarakat cukup resilen karena didukung oleh aktivitas ekonomi utama yang menjadi tulang punggung masyarakat, khususnya pertanian dalam arti luas. Usaha wisata merupakan kegiatan tambahan (*on top*) dari aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung lama, dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dan budaya serta kearifan local. Dengan rancangan pengembangan yang tepat seperti diarahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf), kegiatan ini selain memiliki motif ekonomi (penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat), juga berpotensi untuk memelihara, memperkaya, bahkan melestarikan budaya setempat, dan mendukung kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, desa wisata, dengan desain dan implementasi yang tepat, dapat mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Keempat, salah satu pilihan untuk mengembangkan pembangunan desa berkelanjutan adalah melalui desa wisata. Pengembangan desa wisata ini dapat mengacu pada pendekatan pemerintahan kolaboratif, dengan kolaborasi Model Pentahelix seperti jua yang sudah dikembangkan Kememparekraf.

Mudah-mudahan setelah mencermati buku kecil ini, para pembaca dapat mengambil intisari dan manfaat dari buku ini.

Editor,

Achmad Suryana

INDEKS

A

Atraksi 60

B

Berkelanjutan 3, 5, 24, 29, 31, 41, 48, 65, 108

C

CHSE 45, 57, 58, 84, 85, 89, 91, 92

Community Based Tourism (CBT) 11

D

Desa Wisata 2, 3, 30, 31, 33, 41, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

E

Ekowisata 84, 98

H

Homestay 57, 68, 69

Hotel 77, 97

I

Inovasi 4, 9, 32, 85, 88

K

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 11, 56, 59, 85

Kolaborasi 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29

Kolaboratif 1, 7, 13, 30

Komunitas 1, 10, 22, 62

P

Pandemi 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 53, 60, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 80, 82, 90, 94, 96, 98, 99

Pariwisata i, iii, iv, 1, 2, 3, 5, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
40, 41, 44, 45, 46, 48, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 78,
79, 80, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 102, 108

Pemerintah 1, 8, 13, 15, 16, 35, 41, 49, 63, 64, 65, 68, 74, 91, 92, 95, 107,
108

Pentahelix 3, 4, 5, 8, 9, 26, 29, 32, 51, 102

S

Sustainable 46, 62, 66, 68

T

Triplehelix 4

W

Wisata 2, 3, 4, 11, 25, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 83,
85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Wisatawan 37, 52, 66, 84

BIOGRAFI EDITOR

Achmad Suryana lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, Juli 1954. Memperoleh gelar Insinyur (sosial ekonomi pertanian) serta Magister Sains (ekonomi pertanian) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ph.D (in economics) dari North Carolina State University, Amerika Serikat tahun 1986.

Pada saat ini Suryana sebagai staf pengajar luar pada program Magister Sains dan Doktor Agribisnis, Pasca Sarjana IPB dan Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Di kancah internasional, Suryana menjadi anggota *Policy Advisory Council, Australia Centre for International Agricultural Research (PAC-ACIAR)*, periode July 2020-2023. Suryana juga aktif sebagai anggota Bidang Substansi dalam pertemuan *Agriculture Working Group (AWG) G20* Presidensi Indonesia Tahun 2022. Sejak tahun 2017 sampai sekarang Suryana menjadi Ketua Tim Editor publikasi ilmiah Analisis Kebijakan Pertanian (akreditasi Sinta 2) yang diterbitkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Achmad Suryana mulai bekerja di Kementerian Pertanian sebagai peneliti sampai meraih jenjang Peneliti Ahli Utama dan dikukuhkan sebagai Profesor Riset tahun 2008. Dalam jenjang jabatan struktural, Suryana menduduki jabatan eselon I sebagai Kepala Badan Urusan/Bimas Ketahanan Pangan (2000-2004), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2004-2008) dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (2008-2014).

Di bidang legislasi, Suryana diberi mandat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemerintah dalam tiga pembahasan Undang Undang (UU), yaitu: i) UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*; ii) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; dan iii) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BIOGRAFI PENULIS

Masyithah Aulia Adhiem adalah Analis Legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S-1 Biologi di Universitas Indonesia dan pendidikan S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan antara lain: “Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan Indonesia: Quo Vadis?” (2020), “Prospek Sektor Manufaktur dan Pemulihan Ekonomi Nasional” (2021), “Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing” (2021), “Pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi Pembangunan Berkelanjutan (2021), “Mempertahankan Ketahanan Pangan dan Menjaga Keanekaragaman Genetik Tanaman Pangan” (2022). Penulis dapat dihubungi di masyithah.adhiem@dpr.go.id

Rais Agil Bahtiar, menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat)” (2018); “Partisipasi Masyarakat dan Perannya dalam Membangun Pariwisata” (2019); “Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di

Indonesia” (2020). Penulis dapat dihubungi di rais.bahtiar@dpr.go.id

Sony Hendra Permana, adalah Analis Legislatif bidangnya ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Kebijakan Ekonomi. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, “Peranan Logistik Ekspres Bagi Pengembangan Sektor UMKM di Indonesia”, dan “Utilization of the Internet as Media for Marketing SMEs Products”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony.hendra@dpr.go.id